



Informasi Strategis

Jum at, 9 O ktober 2020

Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
Gedung AH Nasution Lt. 14



SUMBER KEKAYAAN ALAM

Batubara Bakal Jadi Barang Tambang Kena Pajak di UU Cipta Kerja, Respons APBI

Pada tanggal 8 Oktober 2020 di Jakarta, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menyatakan bahwa, pihaknya masih mengkaji secara komprehensif terlebih dahulu mengenai butir-butir aturan pajak untuk batubara di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

LEVEL KEPENTINGAN TINGKAT KABUPATEN

RENDAH SEDANG TINGGI SANGAT TINGGI

LEVEL KEPENTINGAN TINGKAT PROVINSI

RENDAH SEDANG TINGGI SANGAT TINGGI

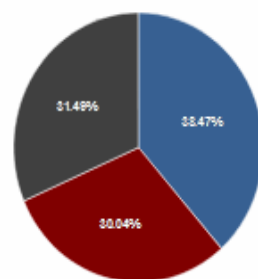
LEVEL KEPENTINGAN TINGKAT NASIONAL

RENDAH SEDANG TINGGI SANGAT TINGGI

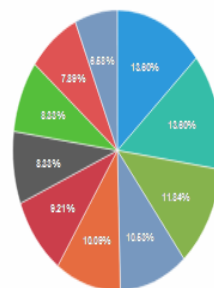
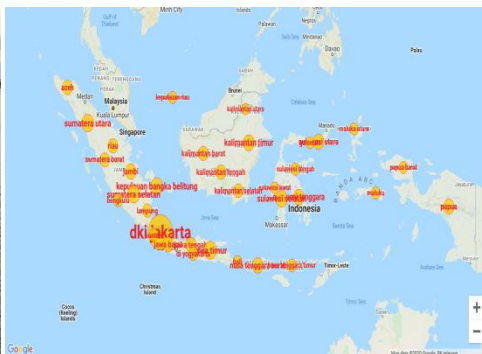
EXPOSURE

1.301 Berita
Lokal – nasional

1.681.968 mentions



● Positive ● Negative ● Neutral



● Cnbc Indonesia
● Bisnis Indonesia
● Kontan
● Antara
● Republika
● Cnn Indonesia
● Tribun News
● Tribun News Makas...
● Liputan 6
● Merdeka

IMPLIKASI RESIKO

UU Cipta Kerja bakal mempunyai pengaruh besar bagi industri tambang batubara tanah air, salah satunya karena *beleid* baru tersebut menetapkan batubara sebagai Barang Kena Pajak (BKP). Namun perubahan yang terjadi di UU Cipta Kerja ini dilakukan agar kewajiban pajak utamanya ditujukan kepada pemegang PKP2B bakal lebih besar sesuai amanat UU Minerba.

166 Ribu Rumah Warga Palestina Dihancurkan Israel

The Land Research Centre of the Arab Studies Association menyatakan bahwa sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, negara tersebut telah menghancurkan 166 ribu rumah warga Palestina. Kegiatan itu telah menyebabkan satu juta orang kehilangan tempat tinggal dan pada akhirnya mereka menjadi pengungsi. Praktek dan pembongkaran rumah milik warga Palestina sangat sering dilakukan Israel dengan beralasan bahwa pembangunan tersebut tidak memiliki izin. Kemudian, kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Israel yaitu dengan melakukan pembatasan pembangunan rumah atau konstruksi lainnya yang dilakukan oleh warga Palestina. Penerbitan izin pembangunan juga dipersulit oleh pihak Israel dan dikenakan biaya yang cukup mahal.

INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

AMAN

MENGKHAWATIRKAN

WASPADA

SIAGA

IMPLIKASI
POLITIK

IMPLIKASI
SOSIAL

IMPLIKASI
EKONOMI

IMPLIKASI
HUKUM

IMPLIKASI
HANKAM

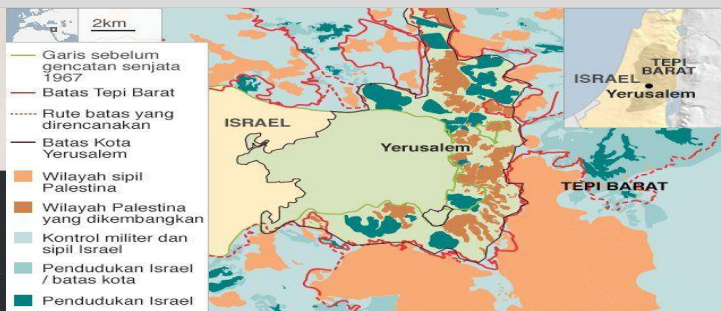
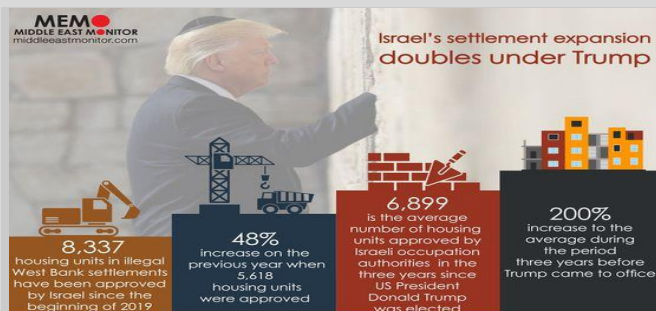
BERDAMPAK
TIDAK
LANGSUNG

BERDAMPAK
TIDAK
LANGSUNG

BERDAMPAK
TIDAK
LANGSUNG

BERDAMPAK
TIDAK
LANGSUNG

BERDAMPAK
TIDAK
LANGSUNG



Apabila Israel terus melakukan upaya pembongkaran rumah warga Palestina dengan tujuan memperluas pemukiman Yahudi maka hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan komitmen Israel saat terjadinya kesepakatan normalisasi dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain yang akan semakin mempersulit upaya mewujudkan perdamaian Palestina-Israel.

AS Mempertahankan Penangguhan Bantuan Militer Ke Mali.

J. Peter Pham, Utusan Khusus AS untuk Sahel mengatakan bantuan militer dari pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada pemerintah Mali akan tetap ditangguhkan meskipun ada pembentukan pemerintahan transisi menyusul terjadinya kudeta militer pada tanggal 18 Agustus 2020 lalu. Namun, selaras dengan kebijakan AS, bantuan keamanan terhadap Mali seperti negara-negara G5 Sahel, yakni dalam operasi Barkhane Prancis dan satuan tugas Takuba Eropa, atau kerja sama dengan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Mali, tetap ada. Kebijakan AS ini berarti Mali tidak akan mendapat dukungan militer AS, termasuk pelatihan pasukan, selama 18 bulan ke depan, hingga otoritas sementara berjanji akan mengadakan pemilihan pemerintah secara konstitusional. Dengan adanya kebijakan AS yang tetap menangguhkan bantuan militernya terhadap Mali, maka hal ini mematahkan harapan pemerintah transisi yang ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional. Hal ini tentu akan berdampak pada ketidakstabilan politik Mali yang tidak kunjung selesai

INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

AMAN

MENGKHAWATIRKAN

WASPADA

SIAGA

IMPLIKASI POLITIK

BERDAMPAK LANGSUNG

IMPLIKASI SOSIAL

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI EKONOMI

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI HUKUM

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI HANKAM

BERDAMPAK LANGSUNG



IMPLIKASI RISIKO

Jika AS yang merupakan mitra internasional Mali menangguhkan bantuan militernya terhadap pemerintah transisi saat ini, maka hal ini menjadi bukti kegagalan pihak oposisi mendapat kepercayaan dunia internasional dalam mengelola pemerintah Mali. Sehingga, dampak yang ditimbulkan akan rentan mendorong ketidakstabilan politik Mali sehinga terindikasi dapat memicu kembali konflik dalam negeri terutama yang dilakukan oleh pemberontak. Kondisi dalam negeri Mali, secara langsung dapat mengancam keselamatan dan keamanan pasukan MPP PBB di Mali termasuk dari Indonesia yakni TNI dan Polri.

MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali)	
Deployed number of personnel as of August 2020 (Civilian data as of May 2018)	
<div><div>15,196</div><div>Total personnel</div></div>	<div><div>1,421 Civilians</div><div>11,403 Contingent Troops</div><div>34 Experts on Mission</div><div>1,714 Police</div><div>450 Staff Officer</div><div>174 UN Volunteers</div></div>
Authorised number of personnel	
<div><div>15,209</div><div>Total uniformed personnel</div></div>	<div><div>13,289 Military personnel *</div><div>1,920 Police (including formed units)</div><div>An appropriate civilian component</div></div>

Juli 2020

Indonesia dan Australia tengah mematangkan rencana untuk pengerahan bersama (co-deployment) pasukan pemelihara perdamaian untuk misi PBB di Mali (MINUSMA).

Agustus 2020:

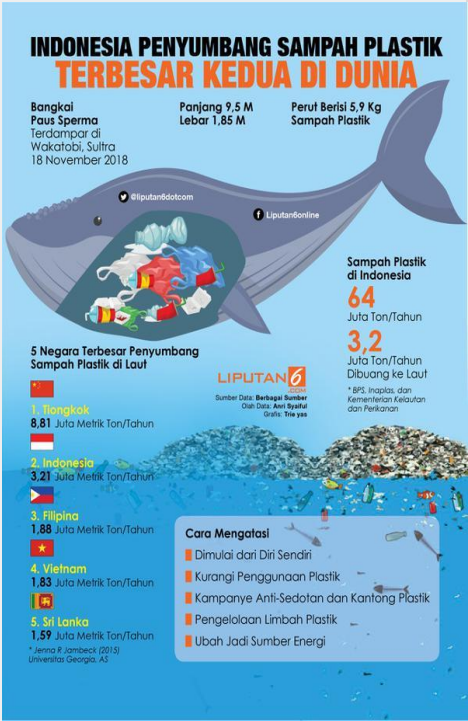
Presidensi Indonesia mengesahkan setidaknya 3 Resolusi mengenai perpanjangan mandat Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), Sanksi terhadap Mali untuk dukung proses perdamaian, dan Misi PBB di Somalia (UNSDM).

Sept 2020:

Pemerintah Indonesia memberikan Tanda Kehormatan Satya Lancana Bhakti Buana terhadap 140 personel Satgas Garuda Bhayangkara FPU I MINUSCA.

Dasar Laut Dunia Sudah Tercemar 14 Juta Ton Sampah Plastik Mikro

Organisasi Penelitian Ilmiah dan Industri Persemakmuran (CSIRO) menerbitkan perkiraan global pertama di dunia mengenai skala pencemaran sampah plastik mikro di laut dalam. Dengan menganalisis sampel yang dikumpulkan sebuah kapal selam robotik dari sejumlah lokasi terpencil di sekitar pesisir selatan Australia, mereka menemukan fakta bahwa tingkat pencemaran di dasar laut dua kali lipat dari tingkat pencemaran di permukaan. Jumlah sampah plastik mikro yang terdeteksi 25 kali lebih tinggi dibanding studi-studi terdahulu tentang laut dalam. Para peneliti memperluas data dari temuan mereka dan penelitian lain di seluruh dunia dan memperkirakan bahwa secara global, dasar laut menampung sekitar 14 juta ton sampah plastik mikro. Hal itu mengindikasikan perlunya segera menghasilkan solusi efektif bagi polusi plastik. Kita bisa membantu mengurangi plastik yang berakhir di lautan dengan cara menghindari penggunaan plastik sekali pakai, mendukung industri daur ulang dan limbah serta membuang sampah dengan bijak agar sampah tidak berakhir di lingkungan kita.



IMPLIKASI
RISIKO

Jika pemerintah dan masyarakat tidak konsisten untuk mendukung program pembatasan penggunaan plastik maka akan mengancam lingkungan dan kelangsungan hidup biota laut.